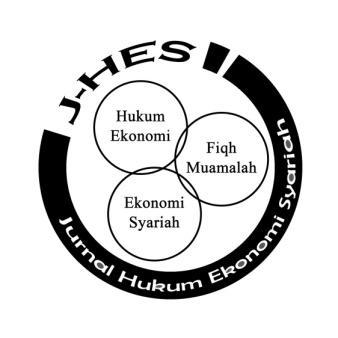
**J-HES**

**Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume … | Nomor … | Bulan Tahun Terbitan**

**p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970**



**Jual Beli Produk Boikot dan Maslahah Mursalah Telaah terhadap Fatwa MUI No 83 Tahun 2023**

***Alamsyah1, Erty Rospyana Rufaida2***

1 Universitas Muhammadiyah Makassar[│](about:blank) [alamsyah@unismuh.ac.id](mailto:alamsyah@unismuh.ac.id)

**Abstrak**

Penerbitan Fatwa No. 83 Tahun 2023 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang seruan menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel menimbulkan dinamika sosial, ekonomi, dan religius di masyarakat Indonesia. Fatwa ini tidak hanya merupakan ajakan moral, tetapi juga instrumen hukum Islam yang berpijak pada prinsip *maslahah mursalah*, yakni pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak tercantum secara eksplisit dalam nash. Studi ini bertujuan untuk menganalisis fatwa tersebut dari perspektif hukum Islam kontemporer serta mengevaluasi dampaknya terhadap m asyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-teologis dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa fatwa memiliki dasar teologis yang kuat, mendorong solidaritas umat terhadap Palestina, dan menjadi bentuk jihad ekonomi yang sah. Namun, tantangan muncul dalam praktik, seperti keterbatasan informasi produk, ketergantungan konsumen, dan risiko ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Studi ini menyimpulkan bahwa fatwa tersebut merupakan produk ijtihad kontemporer yang relevan secara sosial dan spiritual, serta perlu dukungan kebijakan agar pelaksanaannya optimal.

**Kata Kunci:** Fatwa MUI, Boikot, Maslahah Mursalah, Jihad Ekonomi, Hukum Islam Kontemporer

***The Trade of Boycotted Products and Maslahah Mursalah: A Study of MUI Fatwa No. 83 of 2023***

***Abstract***

*The issuance of the Fatwa by the Indonesian Ulema Council (MUI) No. 83 of 2023 concerning the call to avoid products affiliated with Israel has sparked social, economic, and religious dynamics within Indonesian society. This fatwa is not merely a moral appeal but serves as a religious instrument grounded in the principle of maslahah mursalah consideration of public interest not explicitly mentioned in the scriptural texts of Islamic law. This study aims to analyze the fatwa from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence and to evaluate its socio-economic impact on society. The research employs a qualitative descriptive method with a normative-theological approach and literature review as the primary data collection technique, alongside content analysis and critical review as methods of data analysis. The findings indicate that the fatwa has a strong theological foundation and reflects the solidarity of the Muslim community with Palestine. It also promotes non-violent resistance through economic jihad. However, the implementation of the fatwa faces several challenges, such as consumer dependency on certain products, lack of information regarding product affiliations, and economic losses for small business actors. The study concludes that MUI Fatwa No. 83 of 2023 is a product of contemporary ijtihad that reflects the scholars' response to global injustices. Although advisory in nature, the fatwa carries normative weight that fosters a collective awareness among Muslims to act in accordance with the values of justice, humanity, and public interest within the framework of Islamic law.*

***Keywords:*** *Trade; Boycott; Maslahah Mursalah; MUI Fatwa No. 83 of 2023*

**PENDAHULUAN**

Dalam menghadapi kompleksitas globalisasi, umat Islam dihadapkan pada tantangan moral, spiritual, dan ekonomi yang saling bersinggungan. Salah satu respons yang menonjol terhadap kondisi dunia kontemporer adalah penerbitan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 83 Tahun 2023 yang mengimbau umat Islam untuk menghindari produk-produk yang memiliki afiliasi dengan entitas yang mendukung agresi militer Israel terhadap Palestina. Fatwa ini menegaskan bahwa perjuangan umat Islam tidak terbatas pada medan tempur fisik, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk solidaritas moral dan ekonomi sebagai bentuk jihad non-kekerasan. Dalam konteks Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, seruan ini tidak hanya menjadi cermin keberpihakan terhadap nilai keadilan global, tetapi juga menciptakan dinamika sosial, hukum, dan ekonomi yang memerlukan perhatian akademik dan praktis.

Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 hadir sebagai produk keagamaan yang merespons tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Palestina, khususnya di Jalur Gaza. Dengan latar belakang eskalasi kekerasan oleh militer Israel, fatwa ini menyerukan empat poin penting: dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, pemberian infaq, zakat, dan sedekah kepada rakyat Palestina, kebolehan penyaluran zakat ke luar daerah muzakki dalam kondisi darurat, serta larangan memberikan dukungan, langsung maupun tidak langsung, kepada pihak yang berpihak pada Israel (Nugraha, 2023). Salah satu poin utama yang menarik perhatian adalah imbauan untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel dan Zionisme. Dalam kerangka hukum Islam, ajakan ini mencerminkan upaya menegakkan prinsip keadilan global dan solidaritas kemanusiaan.

Secara umum, fatwa dalam Islam merupakan instrumen normatif yang berfungsi sebagai panduan umat dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Fatwa bersifat fleksibel, kontekstual, dan dinamis, sehingga mampu menjawab tantangan zaman. Namun, fatwa juga bergantung pada penerimaan umat dan efektivitas implementasinya di tengah realitas sosial dan ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap landasan epistemologis dan tujuan normatif fatwa sangat penting untuk menganalisis potensi dan keterbatasannya dalam membentuk perilaku kolektif umat Islam (Ma’mur, 2018; Febriadi et al., 2020).

Dalam konteks fatwa boikot produk Israel, salah satu pendekatan hukum Islam yang digunakan adalah *maslahah mursalah*. Konsep ini merujuk pada pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash syariat, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. *Maslahah mursalah* menjadi salah satu pijakan penting dalam penetapan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul di masyarakat. Dalam pandangan Imam Malik, *maslahah mursalah* dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Sementara itu, Imam Al-Ghazali memberikan syarat ketat terhadap penggunaannya, seperti keharusan maslahat yang rasional, sesuai tujuan syariah, dan tidak bertentangan dengan dalil eksplisit (Syamsuddini, 2022). Dengan demikian, fatwa MUI No. 83 menjadi representasi konkret dari proses ijtihad kontemporer yang berpijak pada *maslahah mursalah*.

Penelitian ini bermaksud menganalisis fatwa tersebut dari perspektif hukum Islam dan mengevaluasi sejauh mana fatwa dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat modern. Berbagai studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa fatwa memiliki peran signifikan dalam membentuk kesadaran publik dan mengarahkan tindakan kolektif umat, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan keadilan dan kemanusiaan global (Thoyyibah et al., 2023). Dalam kasus ini, fatwa MUI mendorong tindakan boikot sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, sekaligus sebagai perlawanan ekonomi terhadap entitas yang dianggap mendukung Zionisme. Konsep ini dikenal sebagai *jihad ekonomi*, yaitu bentuk perlawanan yang mengandalkan kekuatan pasar dan preferensi konsumen sebagai instrumen tekanan politik.

Namun, di balik idealisme fatwa, terdapat realitas yang tidak dapat diabaikan. Tantangan implementasi fatwa ini sangat kompleks. Pertama, banyak konsumen yang sudah bergantung pada produk multinasional, baik dari segi kualitas maupun ketersediaannya di pasar. Kedua, informasi mengenai afiliasi produk dengan Israel sering kali tidak tersedia secara transparan, sehingga masyarakat kesulitan untuk menentukan sikap. Ketiga, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami dampak ekonomi secara langsung akibat perubahan preferensi konsumen yang mendadak, terutama dalam hal stok barang yang sudah terlanjur dibeli (Husna et al., 2023; Syahputra, 2024). Keempat, dalam konteks hukum positif di Indonesia, fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, karena tidak dilengkapi dengan sanksi hukum formal (Antomi et al., 2024). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana fatwa dapat memengaruhi perilaku konsumen secara nyata.

Lebih lanjut, pendekatan fatwa ini juga menimbulkan polemik dari segi hubungan antara otoritas keagamaan dan otoritas negara. Prinsip *at-ta’awun* (saling tolong-menolong) dan ketaatan kepada pemimpin menjadi pertimbangan penting, terutama dalam negara demokratis seperti Indonesia yang memiliki pluralitas otoritas hukum dan sosial. Tanpa adanya harmonisasi antara fatwa keagamaan dan kebijakan negara, masyarakat dapat mengalami kebingungan dalam menentukan sikap (Syahputra, 2024). Oleh karena itu, penting untuk melihat fatwa ini tidak sebagai entitas tunggal, melainkan sebagai bagian dari wacana fiqh kontemporer yang terus berkembang dan berdialektika dengan dinamika sosial-politik global.

Sebagai upaya strategis, fatwa boikot juga memiliki implikasi positif terhadap penguatan industri halal dalam negeri. Jika masyarakat Muslim secara luas menerapkan boikot terhadap produk-produk asing yang mendukung Zionisme, maka seharusnya ada dorongan kebijakan yang mendukung pengembangan produk lokal sebagai alternatif. Dalam beberapa kasus, seperti yang ditunjukkan oleh Nurhaliza et al. (2024), minat beli terhadap produk lokal meningkat pasca keluarnya fatwa. Namun, produk dalam negeri masih menghadapi tantangan dari segi kualitas, distribusi, dan kepercayaan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi fatwa memerlukan dukungan struktural dari sektor ekonomi dan kebijakan negara agar tidak hanya menjadi simbol perlawanan, tetapi juga kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dalam perspektif fatwa sebagai produk ijtihad kontemporer serta menelaah prinsip *maslahah mursalah* yang melatarbelakanginya. Kajian ini juga akan mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari fatwa tersebut di masyarakat Indonesia serta mengidentifikasi tantangan-tantangan praktis yang muncul dalam implementasinya. Secara metodologis, penelitian menggunakan pendekatan normatif-teologis dan studi pustaka sebagai teknik utama, yang dipadukan dengan analisis isi dan telaah kritis untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap substansi fatwa dan implikasinya.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap hubungan antara produk hukum Islam dan dinamika masyarakat global yang semakin kompleks. Dengan memadukan analisis hukum, teologi, ekonomi, dan kebijakan publik, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna dalam kajian hukum Islam kontemporer serta memperkaya wacana tentang peran fatwa dalam membentuk etika konsumsi dan strategi perlawanan umat Islam terhadap ketidakadilan global.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data secara alami, tanpa melakukan manipulasi terhadap data yang diperoleh (Sugiyono, 2010)

Penelitian di analisisi dengan menggunakan Pendekatan Normatif-Teologis. Pendekatan normatif-teologis dalam kajian Islam adalah cara dasar untuk memahami serta mengamalkan ajaran agama Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa kebenaran ajaran agama Islam bersumber dari wahyu ilahi, yakni Al-Qur’an dan Hadis (Ariani, et al., 2024). Menelaah Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dari perspektif hukum Islam, serta melihat apakah jual beli produk boikot selaras dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya melalui teori *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, dokumen, atau media elektronik yang tersedia di perpustakaan maupun secara online (Arcanita, et al., 2023). Data penelitian menggunakan sumber-sumber seperti Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 secara langsung, literatur klasik dan kontemporer tentang *maslahah mursalah*, literatur fiqh muamalah tentang jual beli, boikot, dan etika konsumsi dalam Islam, artikel ilmiah, jurnal, dan pendapat para ulama kontemporer.

Metode analisis data dengan menggunakan Analisis Isi (*Content Analysis*) dan Telaah Kritis (*Critical Analysis*). Teknik sistematis merupakan teknik yang terstruktur untuk menganalisis pesan atau sebagai sarana untuk mengamati dan mengevaluasi isi dari perilaku komunikasi terbuka yang dilakukan oleh komunikator terpilih, baik melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.(Kriyantono, 2006). Data dianalisis melalui beberapa tahap yaitu Menganalisis substansi Fatwa MUI No. 83/2023, Membandingkan fatwa tersebut dengan kaidah-kaidah fiqh dan prinsip *maslahah mursalah* dan Mengkaji sisi kekuatan dan kelemahan fatwa tersebut dari perspektif teoritis dan aplikatif.

Teknik Validitas Data dalam penelitian ini adalah Triangulasi Data. Triangulasi data merupakan proses penggabungan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, waktu, lokasi, dan individu yang berbeda untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat (Zamili, 2015). Validasi data dilakukan dengan Menguji kebenaran dan konsistensi data dengan membandingkan beberapa sumber yang berbeda untuk memperkuat argumentasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Telaah Isi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 yang dirilis pada tanggal 8 November 2023 merupakan tanggapan atas eskalasi agresi oleh pihak militer Israel kepada penduduk Palestina, khususnya di wilayah Jalur Gaza. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memuat empat poin penting terkait hukum mendukung perjuangan Palestina. Pertama, umat Islam diwajibkan mendukung upaya Palestina dalam meraih kemerdekaan dari pendudukan Israel. Kedua, dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian infaq, zakat, dan sedekah untuk membantu rakyat Palestina. Ketiga, meskipun zakat idealnya diberikan kepada penerima di sekitar muzakki, dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak, zakat boleh disalurkan kepada pihak yang jauh seperti di Palestina. Keempat, dilarang secara hukum memberikan dukungan, baik langsung atapun secara tidak langsung, kepada agresi Israel atau pihak yang berpihak pada Israel (Nugraha, 2023).

Salah satu poin sentral dalam fatwa ini adalah “*Imbauan kepada umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme*”. Pernyataan ini bukan sekadar anjuran moral, melainkan memiliki landasan teologis, sosial, dan politik yang kuat. Untuk memahami makna mendalam dari imbauan tersebut, perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam (syariah), etika konsumsi, solidaritas umat, serta strategi perjuangan dalam menghadapi ketidakadilan global.

Makna Frasa “*umat islam diimbau*” dalam konteks fatwa menunjukkan bahwa MUI tidak menetapkan larangan secara mutlak (haram) terhadap setiap transaksi atau konsumsi produk tertentu secara spesifik, tetapi memberikan arahan normatif agar umat Islam mengambil sikap proaktif dalam mendukung perjuangan Palestina. Imbauan ini bersifat *taujihiyyah* (arahan moral) yang dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah. Namun, fatwa ini tidak boleh dianggap ringan. Dalam tradisi Islam, imbauan dari otoritas ulama bisa memiliki kekuatan hukum yang kuat tergantung pada konteks dan maslahatnya. Menghindari transaksi ini, meski bukan secara eksplisit *fardhu* atau *haram* secara individu, menjadi *fardhu kifayah* sebagai bentuk dukungan kolektif umat Islam terhadap rakyat Palestina.

Selanjutnya adalah  **“***semaksimal mungkin***”** sebagai prinsip realistis. Frasa “*semaksimal mungkin*” menunjukkan adanya kesadaran realistis dari MUI bahwa dalam kondisi globalisasi ekonomi saat ini, tidak semua produk bisa dengan mudah ditelusuri keterkaitannya dengan entitas Zionis atau Israel. Banyak perusahaan multinasional yang memiliki jaringan global dan keterkaitan tidak langsung dengan Israel, baik melalui investasi, kepemilikan saham, atau dukungan politik. Dengan demikian, fatwa ini tidak menuntut kesempurnaan yang mustahil, melainkan menyerukan kesadaran dan kehati-hatian. Umat Islam diminta untuk berikhtiar dalam meminimalkan keterlibatan ekonomi dalam jaringan yang mendukung agresi dan penjajahan. Selain itu Fatwa MUI dalam konteks sistem hukum positif bukanlah hukum negara yang dapat diterapkan secara wajib kepada seluruh warga negara, karena fatwa tersebut tidak dilengkapi dengan sanksi dan tidak harus diikuti oleh semua orang. Fatwa MUI hanya berlaku dan mengikat bagi umat Islam yang merasa terikat dengan keputusan MUI (Antomi, et al., 2024).

Selanjutnya adalah “*transaksi dan penggunaan produk: dimensi ekonomi dan sosial*”. Fatwa ini menyebut dua hal yaitu transaksi dan penggunaan produk. Artinya, larangan tidak hanya pada membeli (transaksi), tetapi juga mengonsumsi dan mempromosikan produk tersebut. Hal ini mencakup:

1. Pembelian langsung: Produk makanan, minuman, elektronik, kosmetik, dan lain-lain yang berasal dari atau berafiliasi dengan perusahaan pendukung Israel.
2. Promosi dan konsumsi publik: Penggunaan produk dalam kegiatan sosial yang secara tidak langsung mempromosikan keberlanjutan ekonomi entitas tersebut.
3. Distribusi: Menjual kembali atau menjadi distributor produk tersebut.

Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak boleh berdiri sendiri tanpa pertimbangan moral dan etika. Dengan menghindari transaksi tersebut, umat Islam menjaga agar tidak menjadi bagian dari sistem ekonomi yang menopang penjajahan dan kekerasan.

Selanjutnya adalah “*terafiliasi dengan israel dan mendukung zionisme*”. Poin penting dalam fatwa ini adalah kejelasan istilah “*terafiliasi dengan Israel*” dan “*mendukung penjajahan dan zionisme*.” Secara umum, afiliasi di sini bisa berarti:

1. Hubungan bisnis langsung yaitu perusahaan yang bermarkas di Israel atau memiliki fasilitas produksi di wilayah pendudukan.
2. Dukungan finansial/politik artinya adalah perusahaan yang menyatakan dukungan terhadap militer Israel atau memberikan bantuan secara langsung.
3. Keterlibatan ideologis yaitu perusahaan atau merek yang diketahui aktif mendukung gerakan zionis secara global.

Dengan menghindari produk-produk seperti itu, umat Islam secara kolektif menarik dukungan ekonomi dari mesin industri dan politik yang mendukung agresi terhadap Palestina.

**Boikot sebagai Bentuk Jihad Ekonomi**

Jihad dalam pelaksanaannya dapat dibagi menjadi tiga aspek: pertama, jihad diri atau bersifat pribadi, yang berarti berusaha menghilangkan segala perilaku dan pikiran yang merusak serta menjauhi ketidaktaatan kepada Allah swt. Dengan berjihad terhadap diri sendiri, seseorang dapat memperbaiki diri, meningkatkan ketaatan, dan senantiasa menegakkan yang ma'ruf serta menghindari kemungkaran dalam kehidupannya (Benua, 2017). Kedua, jihad komunitas, yaitu berusaha memastikan ajaran Islam tetap tegak dan diterapkan dalam masyarakat atau keluarga melalui dakwah, serta menanamkan dan memelihara pandangan yang benar (Shihab, 1996). Ketiga, jihad dalam konteks kenegaraan, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kedamaian negara, melindungi negara dari ancaman luar, serta memastikan warga negara dapat hidup dalam damai dan menjalankan ibadah dengan tenang (Pamungkas, 2012).

Mendukung kezaliman dalam konsep islam baik secara langsung maupun tidak langsung adalah haram. Allah SWT berfirman: "*Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka..."* (QS. Hud: 113). Mendukung ekonomi entitas zionis dapat dikategorikan sebagai *tawalli al-zhalimin* (loyalitas terhadap orang zalim). Dengan demikian, menjauhi produk mereka bukan hanya solidaritas politik, tetapi juga keharusan moral dalam Islam. Boikot merupakan strategi non-kekerasan yang dikenal luas dalam sejarah perjuangan. Dalam konteks Palestina, boikot merupakan bagian dari kampanye internasional yang dikenal sebagai BDS (*Boycott, Divestment, Sanctions*), yang menyerukan pemutusan hubungan ekonomi dan budaya dengan Israel sampai hak-hak rakyat Palestina ditegakkan (Verianty, 2024). Dalam Islam, jihad tidak selalu berarti perang fisik. Jihad dapat berarti upaya maksimal dalam bidang ekonomi, intelektual, dan sosial. Menghindari produk pendukung zionisme adalah bentuk jihad ekonomi. Rasulullah SAW sendiri pernah memboikot Bani Quraizhah dan Yahudi Bani Nadhir yang mengkhianati umat Islam.

Mengikuti imbauan untuk lebih selektif dalam memilih produk konsumsi memiliki sejumlah dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan kemandirian ekonomi. Pertama, hal ini dapat mendorong umat Islam untuk lebih sadar secara politik terhadap pentingnya memperhatikan asal-usul produk yang dikonsumsi. Selain itu, imbauan ini juga dapat memacu pertumbuhan produk lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai alternatif dari produk-produk multinasional. Lebih jauh, tindakan ini menjadi bentuk solidaritas global terhadap penderitaan rakyat Palestina serta berpotensi menekan perusahaan-perusahaan pendukung Israel untuk meninjau kembali kebijakan politik mereka melalui tekanan pasar.

**Jual Beli Produk Boikot dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan hubungannya dengan *Maslahah Mursalah***

*Maslahah mursalah* merupakan prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pada upaya untuk mencapai kemaslahatan umum tanpa bertentangan dengan syariat. Prinsip ini digunakan untuk menetapkan hukum terhadap perkara-perkara yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun memiliki tujuan yang baik dan tidak bertentangan terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam dasar Islam. Dalam konteks boikot produk Israel, tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan umum, yaitu mendukung perjuangan Palestina dan menekan ekonomi Israel.

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang menyerukan umat Islam untuk memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel dapat dianalisis dengan menggunakan prinsip *maslahah mursalah*, yakni pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash* (teks Al-Qur’an atau hadis), tetapi tidak bertentangan dengannya. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dapat dianalisis melalui persyaratan *maslahah mursalah* dari hasil perbandingan antara Imam Malik dan Imam Al-Ghazali dalam studi inklusif yang diusung oleh Imam Al-Ghazali. Persyaratan ini mencakup beberapa hal penting: pertama, hasil dari maslahat tersebut haruslah sesuai dengan dalil hukum Islam; kedua, al-maslahat al-mursalah tidak boleh bertentangan dengan nash yang ada; ketiga, maslahat tersebut harus rasional dan memberikan manfaat yang pasti; dan keempat, maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil yang ada, serta harus didasarkan pada tujuan yang jelas dan sah dalam konteks hukum Islam (Syamsuddini, 2022).

Berdasarkan analisis persyaratan *al-maslahat al-mursalah* menurut Imam Al-Ghazali, boikot jual beli produk Israel dapat dipandang sebagai tindakan yang sah dalam hukum Islam, karena: Sejalan dengan tujuan utama hukum Islam yaitu menegakkan keadilan dan melawan penindasan, Tidak bertentangan dengan nash karena tidak ada dalil yang secara eksplisit mengharamkan boikot terhadap pihak yang melakukan penindasan, Dapat dibenarkan secara rasional, karena bisa memberikan dampak ekonomi terhadap negara yang terlibat dalam penindasan terhadap umat Islam serta Tidak ada dalil yang menghalangi untuk mengambil tindakan ini, selama tujuannya adalah untuk mendukung kemaslahatan umat Islam.

**Tantangan dan Kendala Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023**

Implementasi boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel berdasarkan imbauan Fatwa MUI memang menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan boikot ini antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk yang terlibat, ketidaktransparanan informasi dari perusahaan, ketergantungan terhadap produk tertentu, serta masalah logistik terkait stok yang masih ada di pasar. Berikut penjelasan lebih mendalam mengenai tantangan-tantangan tersebut:

Tantangan dan kendala pertama adalah tantangan ekonomi dibanyak pelaku usaha dan konsumen khawatir terhadap potensi kerugian ekonomi, terutama bagi sektor-sektor yang memiliki ketergantungan pada produk impor yang dikaitkan dengan Israel atau perusahaan yang terafiliasi. Ada risiko terhadap stabilitas harga dan pasokan barang, serta dampak terhadap UMKM yang menjual produk-produk tersebut. Sebagaimana penelitian yang mengatakan bahwa terdapat dua kelompok besar yang memberikan sikap terhadap fatwa tersebut, dengan argumentasi yang berbeda. MUI dan pendukungnya menganggap fatwa itu sebagai dukungan moral untuk Palestina dan perlawanan terhadap Israel, sementara pihak lain fokus pada dampak ekonominya (Wibowo, et al., 2024).

Tantangan dan kendala kedua adalah kecenderungan masyarakat untuk bergantung pada produk-produk tertentu. Banyak konsumen yang telah terbiasa dengan produk tertentu, misalnya produk elektronik, makanan, atau kosmetik, yang mungkin terafiliasi dengan perusahaan Israel. Ketergantungan ini sering kali muncul karena kebiasaan jangka panjang atau persepsi bahwa produk tersebut lebih berkualitas dibandingkan dengan produk lain. Sebagai contoh, banyak orang yang merasa sulit untuk beralih dari merek-merek besar yang sudah mereka kenal dan percaya kualitasnya, seperti produk dari perusahaan yang memiliki cabang di Israel. Ketergantungan ini bisa membuat boikot menjadi lebih sulit untuk diterima, karena konsumen cenderung menghindari perubahan atau merasa nyaman dengan produk yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap produk tertentu juga menjadi kendala besar dalam implementasi boikot (Syahputra, 2024).

Tantangan dan kendala ketiga adalah keberadaan stok lama yang masih dimiliki pedagang dan sulit untuk dialihkan. Selain tantangan di tingkat konsumen, stok lama pedagang yang masih terjual di pasaran juga menjadi kendala yang perlu dihadapi. Banyak pedagang atau pengecer yang sudah memiliki persediaan barang-barang yang terafiliasi dengan Israel sebelum adanya imbauan boikot. Stok tersebut tentu tidak bisa langsung dihapus begitu saja karena ada ketergantungan pada produk yang masih harus dijual. Menjual barang-barang yang sudah terlanjur dibeli juga menjadi beban ekonomi bagi pedagang, karena mereka harus mengeluarkan modal untuk produk tersebut tanpa dapat menarik keuntungan maksimal. Selain itu, jika pedagang terpaksa menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan seruan boikot, hal ini dapat merusak reputasi mereka di mata konsumen yang peduli dengan masalah tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa stok lama pedagang yang masih terjual di pasaran juga menjadi kendala yang perlu dihadapi (Syahputra, 2024).

**KESIMPULAN**

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 merupakan respons keagamaan terhadap agresi militer Israel terhadap Palestina, dengan menekankan pentingnya dukungan umat Islam kepada rakyat Palestina melalui berbagai bentuk solidaritas, termasuk aspek ekonomi. Fatwa ini menyerukan umat Islam untuk menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel atau mendukung Zionisme, bukan sebagai larangan mutlak, melainkan sebagai imbauan moral dan tanggung jawab kolektif (fardhu kifayah) yang memiliki kekuatan etik dan teologis dalam Islam.

Secara normatif, fatwa ini berlandaskan prinsip maslahah mursalah, yang menekankan pentingnya kemaslahatan umum, keadilan, dan penolakan terhadap penindasan. Boikot diposisikan sebagai bentuk jihad ekonomi dan strategi non-kekerasan yang sah secara syariat. Meskipun demikian, dalam implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan informasi, ketergantungan pada produk tertentu, dampak ekonomi terhadap pelaku usaha dan UMKM, serta keberadaan stok lama di pasar.

Secara keseluruhan, Fatwa MUI ini merupakan upaya untuk mendorong kesadaran politik, moral, dan ekonomi umat Islam, sekaligus memperkuat solidaritas global terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina melalui pendekatan yang realistis dan kontekstual dalam kerangka hukum Islam.

**DAFTAR** **PUSTAKA**

Antomi, H. et al., 2024. Implikasi Hukum dan Ekonomi Gerakan Boikot Produk Pro-Israel terhadap Perindustrian di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law Review),* 10(4), pp. 1-15.

Arcanita, R., Putrajaya, G., Warsah, I. & Istan, M., 2023. Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan. *TIK Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi ,* 7(1), pp. 117-126.

Ariani, R. et al., 2024. Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam. *AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan),* 3(4), pp. 227-235.

Azhar, I. S., 2020. Relasi Maslahaht Mursalah dengan Maqoshid Syariah dalam Penetapan Hukum Fikih. *JURNAL TAZKIYA,* 9(1), pp. 44-62.

Benua, A. A., 2017. *Jihad Menuju Islam Rahmatan Lil Alamin Dalam Buku Jihad Dalam Islam ; Kedamaian Atau Kekerasan.* Yogyakarta: Ladang Kata.

El Saha, M., 2023. *Boikot sebagai Jihad yang Sah.* Jakarta: Kementerian Agama RI.

Febriadi, S. R., Nurhasanah, N. & Surahman, M., 2020. Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI. *At-Taqaddum,* 12(2), pp. 201-222.

Haniku, H., 2024. *Pengaruh Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Terhadap Penggunaan Produk Unilever Bagi Anggota Organisasi Fatayat dan ‘Aisyiyah Di Kota Bekasi.* Semarang: Digital Library Fakultas Ekonomika dan Bisnis..

Husna, K., Hafidzi, A. & Hanafiah, 2023. Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory,* 1(5), pp. 868-876.

iswanto, A. & Usman, H., 2019. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam UShul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam.* Magelang: UNIMMA Press.

Kriyantono, R., 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi.* Jakarta: Kencana.

Ma'mur, J., 2018. Peran Fatwa Mui dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI). *Wahana Akademika,* 5(2), pp. 41-52.

Masruchi, Z. A., 2023. Hukum Islam: Maslahah Mursalah berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahlu Ushul Fiqh. *Moderasi : Journal of Islamic Studies,* 3(1), pp. 102-116.

Nugraha, D. W., 2023. *Boikot Produk Israel: Antara Solidaritas Kemanusiaan dan Dampak Ekonomi Lokal,.* [Online]   
Available at: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/15/boikot-produk-israel-antara

Nurhaliza, S., Albab, U. & Sutopo, H., 2024. Analisis Dampak Fatwa Mui No 83 Tahun 2023 Terhadap Minat Beli Konsumen Studi Pada Asn Di Pemerintahan Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis Net,* 7(2), pp. 381-389.

Pamungkas, M. I., 2012. *Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda.* Cetakan 1 ed. Bandung: Marja.

Shihab, M. Q., 1996. *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’I Atas berbagai Persoalan Umat, Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’I Atas berbagai Persoalan Umat.* Cetakan 8 ed. Bandung: Mizan.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Syahputra, M. H., 2024. *Analisis Hukum Boikot Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Dengan Tinjauan Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin dan At-Ta’awun.* Bandung: Digital Library UIN Sunan Gunung Djati.

Syahputra, M. H., 2024. *Analisis hukum boikot produk yang terafiliasi dengan Israel dalam fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina dengan tinjauan prinsip ketaatan kepada pemimpin prinsip At-Ta'awun,* Bandung: Digital Library Sunan Gunung Djati Bandung.

Syamsuddini, M., 2022. Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif). *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan ,* 7(2), pp. 103-113.

Thoyyibah, I., Maharani, S. D., Alamsyah, R. & Rosmala, 2023. Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama, 9(2),* pp. 41-54.

Verianty, W. A., 2024. *BDS Movement, Mengenal Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi Terhadap Israel.* [Online]   
Available at: https://www.liputan6.com/hot/read/5703814/bds-movement-mengenal-gerakan-boikot-divestasi-dan-sanksi-terhadap-israel  
[Accessed 05 Mei 2025].

Wibowo, P., Hapsari, R. D. & Ascha, M. C., 2024. Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia. *Journal Publicuho,* 7(1), pp. 382-295.

Wildan, M., 2024. *Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Terhadap Pengharaman Transaksi Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Perspektif Sadd Az-Zari’ah.* Purwokerto: UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.

Zamili, M., 2015. Menghindar Dari Bias: Praktik Triangulasi Dan Kesahihan Riset Kualitatif. *JURNAL LISAN AL-HAL ,* 7(2), pp. 283-304.